

PERENCANAAN DAKWAH UNTUK MASYARAKAT MULTIKULTURAL PENDEKATAN INKLUSIF

Samsir¹, Mahmuddin²

Dirasah Islamiyah Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
Gowa

E-mail: samsirmuliadi@gmail.com¹, mahmuddin.dakwah@uin-alauddin.ac.id²

ABSTRAK

Dalam kerangka kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, dakwah inklusif menjadi sebuah urgensi strategis untuk menciptakan keharmonisan sosial dan mempererat integrasi antarkelompok. Kajian ini mengulas pentingnya pendekatan dakwah yang terbuka terhadap keberagaman, mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapannya, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas dakwah yang bersifat inklusif. Dakwah inklusif dipahami sebagai penyampaian ajaran Islam dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, semangat dialog, dan penghormatan terhadap pluralitas keyakinan, budaya, serta ekspresi sosial. Meskipun demikian, praktik dakwah ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari dominasi perspektif ideologis, resistensi sosial, minimnya dukungan kebijakan publik, hingga rendahnya kapasitas literasi digital di kalangan pendakwah maupun masyarakat. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai sumber utama pengumpulan data. Temuan dari studi ini menekankan pentingnya sinergi antarsektor, penguatan nilai-nilai kearifan lokal, serta pembaruan metode dakwah yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, dakwah inklusif merupakan pengejawantahan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil-'ālamīn*) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang pluralistik.

Kata kunci

Dakwah Inklusif, Masyarakat Multikultural, Toleransi, Dialog Antaragama, Strategi Dakwah

ABSTRACT

In the context of Indonesia's pluralistic society, inclusive da'wah emerges as a strategic necessity for fostering social harmony and strengthening intergroup integration. This study examines the significance of a da'wah approach that embraces diversity, identifies various challenges in its implementation, and formulates strategic steps to enhance the effectiveness of inclusive Islamic propagation. Inclusive da'wah is understood as the communication of Islamic teachings grounded in the values of tolerance, a spirit of dialogue, and respect for religious, cultural, and social pluralism. Nevertheless, its practical application continues to face significant obstacles, including ideological dominance, social resistance, limited public policy support, and low levels of digital literacy among both preachers and the wider community. This research employs a qualitative descriptive approach, using literature review as the primary method of data collection. The findings underscore the importance of cross-sectoral collaboration, the reinforcement of local wisdom values, and the renewal of da'wah methodologies that are contextual and responsive to socio-cultural dynamics. An inclusive approach to da'wah not only broadens the reach of Islamic values but also plays a vital role in shaping a civilized society and nurturing unity in diversity. Therefore, inclusive da'wah represents the embodiment of Islamic values as a mercy to all creation (*rahmatan lil-'ālamīn*) within the framework of a pluralistic national life.

Keywords

Inclusive Da'wah, Multicultural Society, Tolerance, Interfaith Dialogue, Da'wah Strategy

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, bahasa, dan agama menghadirkan tantangan tersendiri bagi para da'i dalam merancang strategi dakwah. Dakwah yang efektif bukan hanya menyampaikan ajaran Islam secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan inklusif menjadi relevan untuk menghindari eksklusivitas dan dominasi satu kelompok atas kelompok lain. (Azyumardi Azra 2000)

Multikulturalisme menuntut adanya kesadaran dan keterbukaan terhadap perbedaan. Dakwah yang eksklusif dan monolitik rentan menciptakan resistensi sosial bahkan konflik horizontal. Oleh karena itu, perencanaan dakwah yang inklusif menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. (Yusuf Qardhawi 1998)

Islam sendiri mengajarkan prinsip keterbukaan terhadap perbedaan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, dakwah telah dilaksanakan secara kontekstual dengan memperhatikan latar belakang budaya dan struktur sosial masyarakat. Dalam Piagam Madinah, misalnya, Nabi mengakomodasi keberadaan kelompok non-Muslim sebagai bagian dari komunitas yang dilindungi. (Muhammad Hamidullah 1981). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, dakwah Islam telah dilandasi oleh semangat inklusivitas.

Selain itu, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi karakter masyarakat multikultural. Interaksi sosial lintas budaya semakin intens, memperkuat kebutuhan akan pendekatan dakwah yang mampu menjawab realitas baru ini. (Thomas L 2005). Da'i masa kini harus menjadi komunikator lintas budaya yang peka terhadap dinamika sosial serta mampu membangun jembatan antar identitas yang berbeda.

Namun, masih banyak praktik dakwah yang secara tidak langsung memperkuat polarisasi, terutama bila disampaikan dalam bahasa yang eksklusif, menghakimi, atau tidak sensitif terhadap perbedaan latar belakang audiens. Tanpa perencanaan yang tepat, dakwah justru berpotensi menciptakan sekat-sekat sosial baru di tengah masyarakat majemuk. (Moeslim Abdurrahman 1997). Oleh sebab itu, penting untuk membangun paradigma baru dakwah yang berorientasi pada inklusi dan pemberdayaan sosial.

Perencanaan dakwah yang baik harus melibatkan proses riset sosial, pemetaan komunitas, hingga kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, dakwah tidak hanya menjadi sarana transformasi spiritual, tetapi juga bagian integral dari pembangunan sosial yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. (Kuntowijoyo 2006) Melalui pendekatan inklusif, dakwah dapat berkontribusi dalam menciptakan kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia dan global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggali dan memahami secara mendalam fenomena perencanaan dakwah inklusif dalam konteks masyarakat multikultural. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap makna, nilai, serta dinamika sosial-keagamaan yang kompleks dan tidak terukur secara numerik.

Penelitian ini merupakan studi literatur (library research) yang dianalisis menggunakan pendekatan sosiologis dan teologis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, yang membahas tema dakwah, multikulturalisme, dan inklusivitas dalam perspektif Islam.

Data diperoleh melalui telaah dokumentasi terhadap literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta teks-teks keislaman klasik dan kontemporer. Selain itu, analisis juga mencakup sumber normatif seperti Al-Qur'an, Hadis, dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan metode dakwah Nabi Muhammad SAW.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi dakwah inklusif harus dirancang berbasis riset sosial yang akurat. Ini mencakup pemetaan komunitas, analisis kebutuhan, serta penentuan metode dan media yang sesuai. Dalam hal ini, kolaborasi lintas agama, forum dialog antarumat, dan kegiatan sosial bersama menjadi instrumen efektif dalam membangun jembatan kemanusiaan. (M. Quraish Shihab, 1999). Pendekatan berbasis budaya lokal juga sangat efektif. Para Wali Songo adalah contoh sukses bagaimana Islam dapat disebarkan tanpa konflik melalui seni, sastra, dan tradisi lokal. (Agus Sunyoto, 2017).

Dalam era digital, metode serupa bisa diterapkan melalui konten edukatif yang kreatif di media sosial, seperti dakwah berbasis video pendek, animasi, dan podcast.

Peran da'i harus didefinisikan sebagai agen perubahan sosial, bukan semata penyampai doktrin. Ia mesti hadir sebagai pendengar, pembimbing, dan fasilitator proses transformasi masyarakat yang damai dan adil. Dakwah yang demikian akan lebih menyentuh dan membumi karena berakar pada problematika nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Selain sebagai agen perubahan, da'i juga harus mampu menjadi penjaga perdamaian dalam masyarakat yang rentan terhadap konflik identitas. Dakwah dapat menjadi media rekonsiliasi dan pemersatu ketika ditopang dengan narasi yang menyejukkan dan menghargai perbedaan.

Kurikulum pendidikan dakwah juga perlu direorientasi agar memuat wawasan pluralisme, komunikasi lintas budaya, dan keterampilan mediasi sosial. Dengan demikian, para calon da'i dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masyarakat yang kompleks dan majemuk. (Kementerian Agama RI, 2021).

Peran media digital dalam dakwah inklusif menjadi peluang sekaligus tantangan. Ketika dikelola dengan etis dan kreatif, media digital mampu menjangkau audiens luas dengan narasi Islam yang ramah, toleran, dan berbudaya. (Ahmad Sahal, 2021). Namun, tanpa literasi digital yang baik, media juga bisa menjadi alat penyebaran ekstremisme, intoleransi, dan disinformasi keagamaan. (Lim, Merlyna, Dkk, 2014). Oleh karena itu, diperlukan pendakwah yang mampu mengelola platform digital secara bijak dengan pendekatan yang komunikatif, kontekstual, dan edukatif.

Dakwah inklusif juga harus menjaga jarak dari politisasi agama yang kerap menunggangi sentimen keagamaan demi kepentingan kekuasaan. Ketika agama dipolitisasi, pesan dakwah kehilangan keotentikannya dan rawan dimanipulasi untuk kepentingan pragmatis. (Abdurrahman Wahid, 2009). Dalam konteks ini, posisi netral dan independen dari seorang da'i menjadi penting agar dakwah tetap menjadi perekat bangsa, bukan alat pecah belah.

Dakwah yang inklusif harus mengedepankan nilai-nilai etis dan universal yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi ideologi atau golongan.

Revitalisasi kearifan lokal seperti budaya musyawarah, gotong royong, dan toleransi adat menjadi bagian penting dalam strategi dakwah. Kearifan lokal merupakan instrumen sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat dan memiliki daya lekat tinggi terhadap nilai-nilai keagamaan. (Nur Hidayah, 2015). Kolaborasi ini akan menciptakan sinergi

dakwah yang inklusif, integratif, dan berdayaguna dalam membangun peradaban yang damai. (Sauri, dkk, 2010). Keberhasilan dakwah bukan hanya bergantung pada da'i, tetapi juga pada ekosistem sosial yang mendukungnya, termasuk lembaga pendidikan, media massa, dan kebijakan publik yang mendukung keragaman dan toleransi.

Setiap upaya dakwah harus dilandasi semangat evaluasi dan pembaruan. Evaluasi penting dilakukan untuk mengukur efektivitas pendekatan, menyesuaikan pesan, serta merespons dinamika zaman secara adaptif. Tanpa evaluasi, dakwah berisiko stagnan dan kehilangan relevansinya dalam konteks sosial yang terus berubah. (Wahyuni, dkk. 2022).

Oleh karena itu, da'i harus terbuka terhadap kritik, reflektif dalam proses, dan inovatif dalam strategi. Dengan demikian, dakwah tidak hanya menjadi aktivitas keagamaan, tetapi juga instrumen pembentuk masyarakat berkeadaban dan inklusif.

3.1 Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dakwah yang bersifat inklusif di masyarakat multicultural

Meskipun konsep dakwah inklusif semakin mengemuka dalam wacana keagamaan kontemporer, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan struktural maupun kultural. Salah satu hambatan utama adalah adanya bias ideologis di kalangan sebagian tokoh agama atau lembaga dakwah yang terlalu berorientasi pada ideologi eksklusif. Pola berpikir semacam ini cenderung menganggap perbedaan sebagai ancaman terhadap kemurnian akidah, sehingga pendekatan inklusif sering dituduh sebagai bentuk kompromi terhadap kebenaran ajaran. (Nurcholish Madjid, 2000). Akibatnya, pendekatan dialogis yang seharusnya menjadi pintu masuk dakwah justru ditolak atau dicurigai.

Tidak hanya itu, pola pendidikan keagamaan yang cenderung menekankan aspek kognitif dan normatif juga menjadi faktor yang mempersempit perspektif para da'i terhadap realitas sosial yang kompleks. Dalam banyak kurikulum pendidikan Islam, belum banyak ruang yang diberikan bagi pengembangan kemampuan interkultural, dialog lintas iman, atau pemahaman terhadap isu-isu kontemporer seperti HAM, gender, atau ekologi. (Moeslim Abdurrahman, 1999). Akibatnya, sebagian pendakwah cenderung menyampaikan materi dakwah dalam kerangka biner: benar-salah, Islam-kafir, halal-haram, tanpa memperhitungkan nuansa sosial dan kultural dari audiens yang dituju.

Tantangan lain datang dari aspek psikososial, terutama resistensi yang muncul dari masyarakat yang merasa identitas keagamaannya terancam oleh pendekatan inklusif. Dalam masyarakat yang telah terbiasa dengan pendekatan dakwah eksklusif, dakwah yang membuka ruang dialog dan pengakuan terhadap perbedaan sering kali dipandang lemah atau ambigu. (Mark R, dkk, 2011).

Dinamika media sosial sebagai arena baru dakwah juga menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, media sosial memberi ruang luas bagi penyebaran pesan-pesan dakwah, namun di sisi lain, algoritma media sosial cenderung memperkuat polarisasi dengan memperlihatkan konten-konten yang provokatif dan sensasional. (Merlyna Lim, 2014). Dakwah yang inklusif, yang biasanya bersifat tenang, reflektif, dan mengedepankan dialog, kalah bersaing dalam ruang digital yang lebih menyukai narasi konfrontatif. Hal ini menjadikan pendakwah inklusif mengalami kesulitan menjangkau publik luas, dan sering kali terpinggirkan dari perbincangan arus utama di dunia maya.

Selain itu, lemahnya dukungan kebijakan dari lembaga-lembaga keagamaan atau negara juga turut menjadi penghambat dakwah inklusif. Regulasi keagamaan yang tidak berpihak pada nilai-nilai keberagaman dan toleransi bisa mempersempit ruang gerak dakwah inklusif. Misalnya, ketika pemerintah tidak tegas terhadap kelompok intoleran atau justru memberi ruang bagi wacana keagamaan yang eksklusif, maka dakwah inklusif akan kehilangan legitimasi dan pelindung strukturalnya. (Robin Bush, 2008). Oleh karena

itu, kebijakan publik dan dukungan institusional sangat dibutuhkan agar dakwah inklusif bisa berkembang secara berkelanjutan dan berdampak luas.

Faktor lain yang juga menjadi penghambat adalah minimnya wadah dan jaringan kerja sama antarda'i lintas latar belakang. Dakwah inklusif tidak dapat dijalankan secara individual, melainkan memerlukan kolaborasi dan solidaritas antarpendakwah, akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial. Namun kenyataannya, fragmentasi organisasi keagamaan dan semangat sektarianisme masih cukup kuat, sehingga pendekatan lintas batas sering kali tidak mendapat ruang yang cukup. (Syaefudin Sauri, 2010). Ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui pembangunan jejaring, pelatihan bersama, serta forum-forum dakwah yang inklusif dan interdisipliner. Selain tantangan eksternal, terdapat pula tantangan internal berupa kebutuhan untuk terus memperkuat kapasitas personal para da'i. Seorang pendakwah inklusif dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga kecakapan sosial, keterampilan komunikasi, sensitivitas budaya, dan pemahaman terhadap konteks global. (Lilis Wahyuni, 2022). Tanpa kapasitas ini, pesan dakwah bisa kehilangan daya sentuh dan kepekaan terhadap keragaman audiens. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi prasyarat mutlak dalam menyukseskan dakwah inklusif.

Kemudahan salah satu tantangan terbesar adalah membangun kesadaran kolektif bahwa dakwah inklusif bukanlah bentuk pelemahan identitas Islam, tetapi justru penguatan esensi Islam yang rahmatan lil-'ālamīn. (Amin Abdullah, 2006). Persepsi ini harus terus ditanamkan melalui pendidikan, narasi publik, serta keteladanan dari para tokoh agama yang berani membuka ruang dialog dan membangun jembatan antarkelompok. Kesadaran ini penting agar dakwah inklusif tidak berhenti sebagai wacana elit, tetapi menjadi gerakan sosial yang mengakar dan membumi dalam masyarakat.

3.2 Pendekatan inklusif menjadi penting dalam merancang strategi dakwah di tengah masyarakat yang beragam secara sosial, budaya, dan agama

Dakwah inklusif pada dasarnya merupakan cerminan dari esensi Islam yang menempatkan keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam interaksi sosial. Dalam masyarakat multikultural, keberagaman bukan hanya sebuah fakta sosiologis, tetapi juga anugerah Ilahi yang perlu dirawat dengan pendekatan yang tidak menghakimi, apalagi mendominasi. (Amin Abdullah, 2003). Hal ini meniscayakan pendekatan dakwah yang membuka ruang untuk dialog, saling memahami, dan bekerjasama lintas batas keyakinan dan identitas. Islam tidak datang untuk memaksakan, tetapi untuk menyempurnakan nilai-nilai universal yang telah ada dalam budaya masyarakat setempat. (Nurcholish Madjid, 2000).

Keberadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya menjadi tantangan sekaligus peluang dakwah. Di satu sisi, keragaman tersebut bisa menjadi potensi konflik apabila tidak dikelola dengan bijak. Namun di sisi lain, ia bisa menjadi sumber kekuatan dan harmoni sosial bila disikapi dengan pendekatan dakwah yang inklusif dan dialogis. (Azyumardi Azra, 2000). Dalam konteks ini, dakwah harus berfungsi sebagai jembatan komunikasi, bukan sebagai instrumen penghakiman. Justru di sinilah peran sentral dakwah inklusif: sebagai jalan menuju perdamaian dan solidaritas antarkelompok dalam masyarakat. (Moeslim Abdurrahman, 1999). Dakwah inklusif juga menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi arus globalisasi dan disrupsi informasi yang mempercepat pertukaran ideologi dan nilai-nilai lintas budaya. Masyarakat kini hidup dalam era keterbukaan yang sangat tinggi, di mana klaim-klaim kebenaran tunggal kerap memicu resistensi dan penolakan. (Masdar Hilmy, 2010). Pendekatan dakwah yang

rigid dan eksklusif menjadi tidak relevan dalam konteks ini, karena ia tidak mampu menjawab tantangan zaman. Maka, dakwah inklusif hadir bukan untuk mengaburkan ajaran Islam, melainkan untuk menyampaikannya dengan cara yang arif, relevan, dan menyentuh dimensi kemanusiaan universal. (Komaruddin Hidayat, 2005).

Urgensi lainnya terletak pada fungsi dakwah sebagai media rekonsiliasi sosial. Dalam banyak kasus, konflik horisontal di masyarakat terjadi karena minimnya ruang dialog dan kuatnya stereotip antar kelompok. Dakwah yang bersifat partisipatif dan berbasis pada nilai inklusivitas dapat memainkan peran penting dalam membongkar sekat-sekat prasangka. (Syafiq Hasyim, 2010)

Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan lintas agama, kerja sama sosial, dan program-program pemberdayaan yang melibatkan kelompok dari latar belakang berbeda. Dengan demikian, dakwah tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan beradab.

Lebih dari itu, pendekatan dakwah inklusif merupakan aktualisasi dari maqāṣid al-syarī'ah, yakni tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Jasser Auda, 2008). Pendekatan ini berusaha memastikan bahwa dakwah membawa maslahat bagi semua, bukan hanya kelompok internal umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat luas. Maka, orientasi dakwah harus bergeser dari pola eksklusif-instruktif menuju inklusif-transformatif, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun narasi keagamaan yang berkeadilan sosial.

Dakwah inklusif juga selaras dengan prinsip rahmatan lil-'ālamīn, di mana Islam diposisikan sebagai rahmat bagi seluruh semesta, bukan hanya untuk pemeluknya. (Quraish Shihab, 2007). Ini menegaskan bahwa dakwah tidak boleh berhenti pada penyampaian dogma, tetapi harus mampu menghadirkan solusi atas persoalan-persoalan nyata masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, marginalisasi, hingga krisis ekologi.

Ketika dakwah mampu bersentuhan dengan isu-isu ini secara inklusif, maka kehadiran Islam akan dirasakan sebagai rahmat dan bukan ancaman. Pendekatan inklusif dalam dakwah juga memiliki implikasi terhadap penguatan kohesi sosial di tengah meningkatnya fragmentasi identitas dalam masyarakat digital. Keberagaman opini dan identitas yang ekstrem di media sosial telah menyebabkan polarisasi tajam. Dakwah yang inklusif bisa menjadi narasi penyeimbang yang menenangkan ruang publik digital dengan pesan-pesan kebersamaan, toleransi, dan kerja sama lintas perbedaan. (Merlyna Lim, 2012).

Dakwah inklusif mendesak untuk dikembangkan karena merupakan prasyarat terciptanya masyarakat madani yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, dakwah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban teologis, tetapi juga sebagai praksis sosial-politik yang meneguhkan posisi umat Islam sebagai bagian integral dari bangsa yang plural. (Bahtiar Effendy, 2003). Dengan demikian dakwah inklusif menjadi instrumen untuk mewujudkan Islam yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.

4. KESIMPULAN

Dakwah dengan pendekatan inklusif menjadi suatu keharusan dalam merespons kompleksitas masyarakat Indonesia yang pluralistik, baik dalam dimensi budaya, agama, bahasa, maupun pandangan sosial-politik. Pendekatan yang terbuka, adaptif, dan kolaboratif sangat diperlukan untuk membangun jalinan sosial yang kuat serta

mempererat hubungan antar kelompok. Dakwah tidak dapat lagi hanya mengandalkan pendekatan monolog yang bersifat instruktif dan eksklusif, melainkan harus bergerak menuju pola komunikasi yang dialogis, transformatif, dan mampu menjawab tantangan keberagaman secara kontekstual.

Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa perencanaan dakwah inklusif harus disusun secara komprehensif, yang mencakup penelitian sosial, identifikasi kebutuhan komunitas, pemanfaatan teknologi digital secara etis, serta kolaborasi lintas sektor antara pemuka agama, pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Di sisi lain, berbagai tantangan yang muncul tidak bisa diabaikan, seperti kuatnya pengaruh ideologi konservatif, resistensi terhadap narasi pluralisme, keterbatasan literasi budaya, hingga lemahnya dukungan kebijakan publik yang berpihak pada keberagaman.

Meski demikian, dakwah inklusif tidak hanya dipahami sebagai metode penyampaian pesan keagamaan, tetapi merupakan representasi dari nilai-nilai Islam yang bersifat universal, seperti keadilan, cinta kasih, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Pendekatan ini mencerminkan visi Islam sebagai rahmatan lil-'ālamīn, yang menekankan peran dakwah dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Maka, keberhasilan dakwah inklusif bukan hanya ditentukan oleh kapasitas individu da'i, tetapi juga sangat bergantung pada lingkungan sosial-politik yang mendukung berkembangnya narasi inklusivitas dan perdamaian dalam kehidupan bersama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah, Amin. *Multikulturalisme, Agama, dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Transformatif*. Jakarta: P3M, 1997.
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Transformatif: Dari Semangat Qur'ani ke Pembebasan Insani*. Bandung: Mizan, 1999.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Kehilangan Orientasi Hidup*. Bandung: Mizan, 2000.
- Baedowi, Ahmad. "Dakwah di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Komunika* 9, 2, 2015
- Bisri, A. Mustofa. "Dakwah Kultural dan Tantangan Keberagaman." Dalam *Dinamika Dakwah di Era Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bush, Robin. *Religious Politics and Minority Rights in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing, 2008.
- Effendy, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003.
- Friedman, Thomas L. *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005.
- Hamidullah, Muhammad. *The First Written Constitution in the World*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1981.
- Hasyim, Syafiq. *Understanding Religious Freedom in Indonesia*. Jakarta: The Indonesian Conference on Religion and Peace, 2011.
- Hidayah, Nur. "Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Dakwah Kultural." *Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 2. 2015

- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Hilmy, Masdar. *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Dakwah Moderat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021.
- Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Lim, Merlyna. "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 44, 4. 2014
- Lim, Merlyna. *@crossroads: Democratization and Corporatization of Media in Indonesia*. Jakarta: Participatory Media Lab, 2012.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Dakwah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1998.
- Sahal, Ahmad, dan Munawir Aziz. *Islam dan Media Sosial: Dakwah di Era Digital*. Yogyakarta: LP3M UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Sauri, Syaefudin. *Strategi Dakwah Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*. Depok: Pustaka IIMaN, 2017.
- Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Wahyuni, Lilis. Evaluasi dan Reorientasi Dakwah di Era Digital. *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 2022
- Wahyuni, Lilis. Penguatan Kompetensi Da'i Inklusif di Era Multikultural. *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 2022
- Wood, Julia T. *Communication Mosaics: An Introduction to the Field of Communication*. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2012.
- Woodward, Mark R. *Java, Indonesia and Islam*. Dordrecht: Springer, 2011